

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEDULI DALAM
MEWUJUDKAN INKLUSI SOSIAL IBU-IBU KORBAN PERISTIWA 1965
OLEH FOPPERHAM YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

oleh:

Imam Hanafi
NIM 12230017

Pembimbing:

Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP 19660531 198801 1 001

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0247) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1519/Un.02/TD/PP.05.03/8-17

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
PEDULI DALAM MEWUJUDKAN INKLUSI
SOSIAL IBU-IBU KORBAN PERISTIWA 1965
OLEH FOPPERHAM YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IMAM HANAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 12230017
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

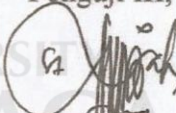

Suyanto, S.Sos., M.Si.

NIP. 19660531 198801 1 001

Penguji II,


Drs. H. Afif Rifai, M.S.
NIP. 19580807 198503 1 003

Penguji III,


Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19831108 201101 2 010

Yogyakarta, 03 Agustus 2017

PLH. Dekan,



Dr. HM. Khalili, M.Si.

NIP. 19590408 198503 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Hanafi
NIM : 12230017
Judul Skripsi : Implementasi Program Peduli dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Ibu-ibu Korban Peristiwa 1965 oleh FOPPERHAM Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwan dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan PMI

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP 19810428 200312 1 003

Dosen Pembimbing

Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP 19660531 198801 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Hanafi

NIM : 12230017

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Program Peduli dalam Mewujudkan Inklusi Sosial

Ibu-ibu Korban Peristiwa 1965 oleh FOPPERHAM Yogyakarta adalah hasil

karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang

dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang

penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka penyusun siap

mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017

Yang menyatakan



Imam Hanafi

NIM 12230017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohiim

*Hamdan wa syukron laka, yaa Allah !!!
Sholaatan wa tasliiman 'alaika yaa Rasulullah !!!*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tersayang,
Sabri dan Hanatun,
Yang senantiasa tak pernah lelah dan tak pernah lupa berdoa,
Memohonkan kebaikan segala atas diriku yang bukan apa-apa.
Lelah lentik jemarimu mendidiku adalah cambuk bagiku untuk tak pernah lupa mendoa;
Kebaikan, kesehatan, keselamatan dan panjang usiamu
Semoga senantiasa terlimpahkan.*

*Kepada kedua saudaraku, Febri Maulidi dan Rudi,
Kalian luar biasa...!!!*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat, yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain

*Dia."*¹

(QS. Ar-Ra'du:11)

"Jika seseorang maju dengan yakin sesuai petunjuk mimpinya, dan berusaha keras untuk hidup seperti yang dia impikan, dia akan bertemu kesuksesan yang tidak terduga dalam hidupnya. Dia akan melampaui sebuah batas yang tidak terlihat; hukum-hukum yang baru, universal, dan lebih liberal akan terbentuk di sekitar dirinya; dan dia akan hidup dengan lisensi dari kehidupan yang lebih mulia."

(Henry David Thoreau)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag* (OS Android) diakses di <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=en> pada 15 Juli 2017 pukul 09:51 WIB.

² Bob Buford, *Hidup Adalah Permainan, dan Inilah Cara Membuat Anda Bisa Menang Cantik dan Terhormat*, (Yogyakarta: Garailmu, 2009) hlm, 194

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim...

Hamdan wa syukron laka, Ya Allah!, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *Sholaatan wa tasliiman 'alaika Ya Rasulallah!*, tauladan sepanjang hidup manusia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Amien...

Pada skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa membantu, membimbing dan memotivasi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan staffnya.
4. Bapak Suyanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasehat serta bimbingannya selama penyusunan skripsi ini. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.

5. Bapak Muhammad Hafiun, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas segala bimbingannya selama penulis menempuh studi di strata 1. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala sesuatunya yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas. Semoga tercatat menjadi amal kebaikan bagimu.
7. Seluruh staff Tata Usaha Jurusan PMI dan staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu memperlancar berjalannya proses administrasi selama menempuh pendidikan strata 1 hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Kepada pengurus dan staff FOPPERHAM yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah bersedia memberikan informasinya terkait dengan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Noor Romadlon, M.Hum., Mbak Pipit Ambarmirah, Bung Supriyadi dan Mbak Astri Wulandari yang telah bersedia menerima penulis sebagai bagian dari keluarga besar dalam suka duka kehidupannya. *Matur sembah nuwun!* dan mohon maaf penulis tidak dapat membalas semua kebaikan itu.
10. Kepada keluarga besar Kiprah Perempuan: Bu Sri Muhayati, Bu Endang Lestari, Bu Kadmiyati, Bu Hartitik, Bu Sumarmiyati, Bu Erlina, dan ibu-ibu yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak

atas kebaikan hidup yang telah kalian ajarkan pada penulis. Semoga penulis senantiasa meneladani perjuangan hidup kalian.

11. Kepada sahabat-sahabat di Fopperham: Erna Ayu Purwandari, Hendrik, Iin Rizkiyah dan Astry Cahyuningsih yang selama ini senantiasa sabar dan ikhlas untuk saling menyemangati dalam kerja-kerja kemanusiaan ini. Terima kasih banyak, semoga ini semua bisa menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan hidup yang lebih baik lagi ke depan. Semangat dan teruslah berjuang!!!
12. Kepada sahabat-sahabat yang tak pernah berhenti tertawa: Hendrik, Khuzairi, Saparwadi, Kenzo, Wahyu Adam, Rifki Habibi, Mad Ilham, Yudi, Mahbuban, Rifki Masroni, Deski, dan sahabat-sahabat lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tawamu sungguh tak menggelikan, Bung! Haha...
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan PMI 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas semangat yang telah kalian tularkan pada penulis, semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sukses yang sebenar-benarnya. Amin
14. Sahabat-sahabat pegiat di *Intellectual Transformation Community* (Intrans Community): Ali Munir, Bizairi, Khalili, Kurdi, Zaifuddin, Rafi'uddin, Soni, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terima kasih telah mendampingi penulis belajar bersama tentang apa yang harus dimengerti dan dipahami di kehidupan yang fana ini.
15. Sahabat-sahabat di Forum Silaturrahi Mahasiswa Keluarga Madura Yogyakarta (FSM-KMY) dan Keluarga Mahasiswa Sumenep Yogyakarta (KMSY) terima kasih atas segalanya.

16. Kepada calon ibunya anak-anakku (sebut saja Mawar), terima kasih banyak, kau adalah semangatku. Semoga Allah senantiasa melimpahkan segala kebaikannya untuk kebaikan kita dan anak-cucu kita kelak. Amin...
17. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi, semoga Allah membalas kebaikanmu semua. Amin...

Akhir kata penulis berdoa, mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa penulis juga sampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan dalam skripsi ini, skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Selanjutnya, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam skripsi ini semakin baik lagi.

Kepada Allah SWT. Penulis beristighfar atas kekhilafan dan dosa-dosa yang penulis lakukan. Semoga segala kebaikannya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Imam Hanafi
NIM. 12230017

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kelompok-kelompok miskin dan marginal di Indonesia yang masih banyak mengalami diskriminasi sosial dan politik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Salah satunya ialah kelompok korban peristiwa 1965 yang selama ini masih dianggap sebagai kelompok yang “berbeda” di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, sehingga kelompok ini sering mendapat ketidak-adilan sosial maupun politik di negeri ini. Program Peduli atas inisiasi pemerintah, dibawah koordinasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hadir untuk menjawab persoalan tersebut. FOPPERHAM sebagai lembaga lokal Yogyakarta diamanahi untuk turut serta dalam proses implementasi Program Peduli dalam memberdayakan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang hadapi oleh kelompok ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan teori Edward tentang model implentasi kebijakan dan teori Gibson dkk. tentang indikator keberhasilan kebijakan. Metode penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui beberapa metode diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan, penulis menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini ada 7 orang informan.

Hasil penelitian terhadap model implementasi Program Peduli oleh FOPPERHAM menunjukkan bahwa: (1)FOPPERHAM menggunakan pola komunikasi birokrasi yang bersifat *top down* dengan melalui pendekatan kelompok dan individu, (2)FOPPERHAM melakukan perekrutan relawan secara berkala dan memberikan fasilitas kepada staff dan relawan demi maksimalnya kerja-kerja di lapangan, dan (3)Indonesia untuk Kemanusiaan merupakan lembaga sebagai sumber informasi utama dan pemberi kewenangan kepada FOPPERHAM dalam implementasi Program Peduli. Sementara keberhasilan implementasi Program Peduli menunjukkan bahwa: (1)Rencana program kegiatan FOPPERHAM diterima secara terbuka oleh ibu-ibu korban 1965, (2)Sebagian besar ibu-ibu korban peristiwa 1965 merasa puas dan terbantu dengan adanya Program Peduli, dan (3)Beberapa ibu-ibu korban peristiwa 1965 sudah mendapat akses dan bantuan layanan dari pihak pemerintah maupun swasta.

Kata kunci: *Implementasi, Program Peduli, Inklusi Sosial, Ibu-ibu korban peristiwa 1965*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Pembahasan	37
BAB II : GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Program Peduli	38
1. Sejarah Program Peduli.....	38
2. Program Kerja dan Kelompok Sasaran Program Peduli	39
3. Mitra Pelaksana Program Peduli	40
B. Gambaran Umum FOPPERHAM	43
1. Letak Geografis Wilayah	43

2. Sejarah Perkembangan FOPPERHAM.....	44
3. Logo FOPPERHAM	46
4. Visi dan Misi FOPPERHAM.....	46
5. Tujuan-tujuan Strategis Program FOPPERHAM	48
6. Kelompok Dampingan FOPPERHAM	48
7. Struktur Pengurus FOPPERHAM.....	49
 BAB III : MODEL DAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEDULI OLEH FOPPERHAM YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN INKLUSI SOSIAL IBU-IBU KORBAN PERISTIWA 1965	
A. Model Implementasi Kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM Yogyakarta	50
1. Komunikasi.....	51
2. Sumber-sumber.....	56
3. Kecenderungan-kecenderungan	70
4. Struktur Birokrasi	72
B. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Ibu-ibu Korban Peristiwa 1965 Yogyakarta	74
1. Keadaptasian.....	75
2. Efisiensi	78
3. Produksi.....	80
4. Kepuasan	84
5. Pengembangan.....	88
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data dan Sumber data	33
Tabel 2.1: Struktur pengurus FOPPERHAM.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor FOPPERHAM tampak dari depan	43
Gambar 2. Logo atau lambang FOPPERHAM	46
Gambar 3. Rapat koordinasi tim pendataan ibu-ibu korban 1965	51
Gambar 4. Pelatihan pengantar HAM dan Gender	58
Gambar 5. Pendidikan Kader <i>Community Organizer</i> Pembangun Desa	59
Gambar 6. Kunjungan TAF ke kantor FOPPERHAM	63
Gambar 7. Alat transportasi sepeda motor	68
Gambar 8. Alat-alat pendokumentasian	60
Gambar 9. Alat-alat dan obat-obat kesehatan	70
Gambar 10. Konsolidasi Kab. Kulun Progo	77
Gambar 11. Pemeriksaan kesehatan di Gunungkidul	82
Gambar 12. Penerimaan bantuan kursi roda dari GKR. Hemas	83
Gambar 13. Penerimaan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial	84
Gambar 14. Pemeriksaan kesehatan di Gunungkidul	86
Gambar 15. Bu ST saat ikut audiensi ke Pemkab. Gunungkidul	87

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memberi pengertian pada kata-kata yang dirumuskan dalam judul skripsi *Implementasi Kebijakan Program Peduli dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Ibu-ibu Korban Peristiwa 1965 oleh FOPPERHAM Yogyakarta*, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah agar dapat memberikan deskripsi yang jelas dan terarah akan maksud dan tujuan skripsi tersebut:

1. Implementasi Kebijakan Program Peduli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Implementasi dimaknai dengan pelaksanaan; penerapan.³ Sedangkan Puji Meilita Sugiana memaknai implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.⁴

Program Peduli adalah sebuah kebijakan pemerintah di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang pada implimentasinya menggunakan

³ Sri Sukesi Adiwimarta, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 327.

⁴ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Program Studi administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012) hlm. 16.

pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan.⁵

Jadi, implementasi Program Peduli yang dimaksud penulis adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan program skala nasional yang bernama Program Peduli di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud).

2. Inklusi Sosial

Secara tatanan bahasa, istilah inklusi sosial berasal dari dua suku kata yaitu “inklusi” dan “sosial”. Menurut Heppy El Rais istilah inklusi dimaknai sebagai: keadaan terkepung atau dikelilingi oleh suatu zat; ketercakupan; kegiatan mengajar siswa dengan kebutuhan khusus pada sekolah reguler.⁶ Sementara istilah sosial menurut W.J.S. Poerwadarminta bermakna (segala sesuatu) mengenai masyarakat; kemasyarakatan.⁷

Dalam kebijakan Program Peduli sendiri yang dimaksud Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Dengan cara mendorong agar elemen masyarakat secara keseluruhan dapat diperlakukan setara dan bisa memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara tanpa ada perbedaan apapun.⁸

⁵ Tentang Program Peduli, <http://programpeduli.org/tentang/> diakses pada tanggal 24 Maret 2016 pada jam 12:25 WIB.

⁶ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 267.

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (cet. X), (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), hlm. 1141.

⁸ Inklusi Sosial, <http://programpeduli.org/inklusi-sosial/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2016 pada jam 02:41 WIB.

Jadi, inklusi sosial yang dimaksud adalah ketercakupan atau keterlibatan seluruh elemen warga masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat tanpa ada perbedaan apapun.

3. Ibu-ibu korban peristiwa 1965

Istilah korban dimaknai oleh W.J.S. Poerwadarminta sebagai (orang yang) menderita kecelakaan akibat dari perbuatannya sendiri atau orang lain.⁹ Terkait dengan peristiwa 1965, Istilah “korban” ini, penulis mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada ibu-ibu yang pernah dipenjara, disiksa, dibunuh, dirampas hartanya pada saat meletusnya peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jadi, penelitian ini hanya difokuskan pada ibu-ibu yang telah mendapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tersebut, yang telah nyata statusnya sebagai “korban” sebagaimana keterangan Komnas HAM tersebut.

4. FOPPERHAM Yogyakarta

FOPPERHAM merupakan singkatan kata dari Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (*Forum for Education and Advocation of Human Rights*) yaitu sebuah lembaga masyarakat sipil non profit yang bergerak dalam pendidikan dan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (cet. X), (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011), hlm. 615.

Dari pemaparan deskripsi di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa skripsi dengan judul *Implementasi Kebijakan Program Peduli dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Ibu-ibu Korban Peristiwa 1965 oleh FOPPERHAM Yogyakarta* adalah suatu penelitian tentang proses pelaksanaan program nasional bernama Program Peduli yang dikerjakan oleh FOPPERHAM dalam rangka mewujudkan kehidupan inklusif bagi ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah satu dasawarsa lebih menjalani reformasi. Di awal reformasi seluruh Rakyat Indonesia berharap dan mengimpikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.¹⁰

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”¹¹

¹⁰ Alinea kedua Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

¹¹ *Ibid.*

Namun sampai saat ini, impian tersebut masih menjadi harapan yang belum menemukan pencapaian yang signifikan, bangsa ini masih dihadapkan pada tantangan dan persoalan-persoalan. Baik persoalan kemiskinan, pendidikan, persoalan kebhinekaan, dan persoalan lainnya yang cukup berdampak negatif dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

Tantangan dan persoalan tersebut kalau diidentifikasi sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, maka kondisi bangsa Indonesia saat ini kurang lebih sebagai berikut: Krisis akhlak dan moral, terjadinya konflik sosial dan budaya, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan maksimal, maraknya praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam aspek ekonomi, sistem politik tidak berjalan dengan baik, proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik, peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan terhadap Pancasila.¹²

Maka tidak salah ketika Sunyoto Usman menyatakan bahwa yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana memelihara sikap masyarakat yang tidak alergi terhadap perbedaan dan keberagaman, atau masyarakat yang dapat memaklumi berbagai bentuk ekspresi atas dasar nilai sosial, budaya, politik, atau keagamaan.

¹² Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cet. 2 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 102-104.

Dikatakan pula, bersamaan dengan itu harus diupayakan tegaknya *the civil rights*; masyarakat sadar dan menganggap negara bukan lagi “penguasa mutlak” atas seluruh rakyatnya. Hubungan antara negara dan masyarakat diupayakan harus dialektis interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam prosesnya, perlu ada akuntabilitas negara (*state accountability*) dalam arti negara harus membangun kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien, dan efektif.¹³ Dalam kata lain, negara harus mampu membuat kebijakan-kebijakan dan membangun pelayanan-pelayanan publik secara inklusif, yang mampu menjangkau segala elemen masyarakat sehingga mereka bisa ikut serta merasakan dan menikmati secara langsung manfaat dari kebijakan dan pelayanan itu.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di BAB II Bagian Ruang Lingkup, Pasal 5 Ayat 2 dinyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.¹⁴ Dalam pemenuhan pelayanan publik itu pemerintah harus menysasar semua elemen masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Seluruh rakyat bisa diperlakukan adil oleh negara (pemerintah) tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

¹³ Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi: Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 149-150.

¹⁴ UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (PDF), <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/jcls1363200676.pdf> diakses pada 7 Maret 2016, Jam 11:18 WIB.

Sementara M. Joni Yulianto dalam pengantar *Indonesia dalam Desa Inklusi* menyatakan bahwa masih banyak sekali kelompok-kelompok yang dianggap berbeda oleh kelompok masyarakat yang lain hanya karena mereka kelompok minoritas. Sehingga yang dianggap “berbeda” tadi menjadi terkucilkan, disingkirkan, dan menjadi terasing di tanah airnya sendiri.¹⁵

Contoh kasus dari hasil studi Akatiga, yaitu sebuah lembaga non pemerintah yang konsen dalam melakukan riset analisis sosial, menyebutkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diterapkan oleh pemerintah masih belum cukup maksimal dalam memberikan layanan terhadap warga masyarakatnya. Masih banyak kelompok-kelompok minoritas dan marginal belum sepenuhnya menikmati hasil dan manfaat dari pelaksanaan PNPM Mandiri. Seperti komunitas difabel, masyarakat suku adat, agama, dan transgender telah mengecualikan kesertaannya di tengah-tengah masyarakat dalam mengakses dan menerima manfaat dari program skala nasional tersebut. Partisipasi mereka sebagai bagian dari masyarakat terhambat oleh diskriminasi dan stigma yang melekat dalam kehidupan sosialnya.¹⁶

Jelas sudah, bahwa sekalipun program pemerintah yang digelar skala nasional ternyata belum mampu sepenuhnya menjangkau semua elemen masyarakat. Masih ada kelompok-kelompok minoritas dan marginal yang hak-

¹⁵ M. Joni Yulianto, sebuah pengantar Ishak Salim, dkk., *Indonesia dalam Desa Inklusi: Pembelajaran dari Temu Inklusi 2014*, (Yogyakarta: SIGAP, 2015), hlm. vi-viii.

¹⁶ Akatiga (2010), “*Marginalized Groups in PNPM-Rural*” dalam arsip Naskah Profile Peduli Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) 1 September 2014.

haknya sebagai warga negara masih terhambat dalam mengakses layanan-layanan pemerintah.

Program Peduli merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang melakukan usaha untuk memberdayakan masyarakat marginal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan dengan menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial”. Untuk merealisasikan kebijakan ini secara maksimal, pemerintah bermitra dengan lembaga masyarakat sipil untuk bisa menjangkau penerima manfaat yang selama ini mengalami eksklusi dari program dan layanan pemerintah yang disebabkan diskriminasi sehingga membuat mereka marginal dan terasingkan dari kehidupan sosialnya.¹⁷ Beberapa kelompok marginal yang acap kali terhambat dalam mengakses layanan-layanan pemerintah seperti: kelompok difabel, transgender, anak jalanan, masyarakat adat, kepercayaan lokal dan bahkan korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965.

Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (*Forum for Education and Advocation of Human Rights*) atau yang biasa disebut FOPPERHAM merupakan organisasi masyarakat sipil di DIY yang ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program Peduli di DIY untuk mewujudkan inklusi sosial terhadap ibu-ibu korban pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu perempuan korban peristiwa 1965, dengan mengupayakan penerimaan

¹⁷<http://programpeduli.org/tentang/> diakses pada 7 Maret 2016 pada jam 11:53 WIB.

masyarakat luas, akses layanan yang disediakan negara, dan perubahan kebijakan yang lebih memihak pada kelompok ibu-ibu korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dirasa sangat menarik untuk mengkaji dan menelaah Program Peduli, yang notabeneanya sebagai program kebijakan pemerintah, dalam rangka mewujudkan inklusi sosial di dalam kehidupan kelompok ibu-ibu korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965 di DIY, agar bangsa dan rakyat Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Alasan ketertarikan penulis untuk meneliti program ini adalah: *pertama*, Program Peduli merupakan program pemerintah yang dirasa cukup kuat dan ampuh untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan sosial yang ada di Indonesia. Terutama persoalan-persoalan terkait dengan kehidupan ibu-ibu korban peristiwa 1965 yang selama ini masih mengalami diskriminasi akibat stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya.

Kedua, dalam implementasi kebijakan ini, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenko PMK, bermitra dengan FOPPERHAM sebagai kelompok masyarakat sipil lokal untuk melaksanakan Program Peduli dalam memberdayakan ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan *ketiga*, isu peristiwa 1965 merupakan isu yang sangat sensitif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia; pro dan kontra terkait isu ini masih sangat kuat dan terasa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model implementasi kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM dalam mewujudkan inklusi sosial ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM dalam mewujudkan inklusi sosial ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan model implementasi kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM dalam mewujudkan inklusi sosial ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Mendeskripsikan keberhasilan implementasi kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM dalam mewujudkan inklusi sosial ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritik
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan model pengkajian perubahan sosial yang inklusif

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan pemberdayaan masyarakat, utamanya jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).

2. Secara praktis

a. Penelitian diharapkan menjadi bahan acuan pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi Program Peduli dalam mewujudkan inklusi sosial terhadap kelompok masyarakat miskin dan marginal di Indonesia, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang pernah menjadi korban pelanggaran HAM di masa lalu

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi para pelaku pemberdayaan masyarakat dan pekerja sosial dalam memberdayakan masyarakat melalui perubahan sosial yang inklusif

c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan dokumentasi serta bahan evaluasi kerja bagi FOPPERHAM agar langkah ke depan semakin strategis dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok miskin marginal di Indonesia, khususnya terhadap kelompok-kelompok korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk melihat keabsahan dan keaslian penelitian ini, maka penulis perlu menyajikan beberapa hasil kajian dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan fokus penelitian ini. Beberapa kajian dan penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Pertama, Uswatun Hasanah (2012) skripsi yang berjudul *Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Pedesaan (PNPM M-D) dalam Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan di Desa Girirejo Bantul*.¹⁸ Skripsi ini memfokuskan pada kaum perempuan agar mampu mengembangkan produktifitas mereka dengan pengelolaan dana yang didapat dari PNPM M-D dengan mengacu pada pendekatan pengentasan kemiskinan melalui simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta uraian tentang keberhasilan PNPM-MD dalam memberdayakan perempuan di aspek sosial dan ekonomi. Bedanya dengan penelitian penulis adalah kelompok dampingan yang merupakan perempuan-perempuan korban peristiwa 1965 yang syarat dengan perasaan trauma di masa lalu.

Kedua, Skripsi Ikhsan yang berjudul *Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pengembangan Sumber daya Manusia, (Studi di Desa Potonoro, Kecamatan banguntapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta)*.¹⁹ Penelitian ini memfokuskan pada peran Unit Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam pengembangan sumber daya manusia serta untuk mengatasi pengangguran di masyarakat. Bedanya dengan penelitian penulis adalah sumber daya manusia yang dikembangkan tersebar di wilayah-wilayah kota dan desa di seluruh DIY secara tidak merata.

¹⁸ Uswatun Khasanah, *Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Pedesaan (PNPM M-D) dalam Memberdayakan Kewirausahaan Perempuan di Desa Girirejo Bantu*, (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹⁹ Ikhsan, *Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pengembangan Sumber daya Manusia (Studi di desa Potonoro Kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, 2010).

Ketiga, Penelitian oleh Syukron Munjazi yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kota Yogyakarta, (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan)*.²⁰ Skripsi ini membahas tentang konsep program PNPM Mandiri dan penerapannya dalam memberdayakan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kelurahan Demangan. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pemberdayaan yang dilakukan FOPPERHAM ialah tidak hanya fokus pada isu kemiskinan semata, melainkan juga dalam rangka pengentasan praktek-praktek diskriminasi baik sosial maupun politik yang menimpa ibu-ibu korban peristiwa 1965 di DIY.

Keempat, Penelitian Pajar Hatma Indra Jaya tentang *Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan kasus PNPM Mandiri sebagai Model Nasional pengentasan Kemiskinan*. Dalam penelitiannya, Pajar membahas tentang analisis audit sosial terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilakukan oleh Gabungan Aliansi Anti Pemiskinan Indonesia (GAPRI), audit sosial tersebut dalam penelitiannya digunakan untuk memeriksa PNPM Mandiri yang dilakukan di Desa Mulyodadi, Kec. Bambanglipuro, Kabupaten Bantul DIY.²¹ Bedanya dengan penelitian penulis adalah persebaran wilayah pemberdayaan Ibu-Ibu korban peristiwa 1965 tersebar di 5 wilayah kab./kota di DIY.

²⁰ Syukron Munjazi, *Pemberdayaan masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan)*, (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009).

²¹ Pajar Hatma Indra Jaya, *Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan Kasus PNPM Mandiri sebagai Model Nasional Pengentasan Kemiskinan*, (Yogyakarta: mu3, 2010).

Kelima, penelitian Irena Nuraeni tentang *Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta*. Penelitian ini membahas tentang upaya-upaya dan manfaat proses pemberdayaan yang dilakukan Kiprah Perempuan kepada ibu-ibu korban pelanggaran Hak Asasi manusia 1965 di Yogyakarta²². Bedanya dengan penelitian penulis adalah program pemberdayaan yang dilakukan oleh FOPPERHAM dan Kiprah Perempuan terhadap ibu-ibu korban 1965 berbeda.

Jadi, dari kelima penelitian tersebut di atas kaitannya dengan judul penelitian penulis adalah ada hal baru yang akan penulis teliti lebih lanjut di sini, yaitu implementasi kebijakan Program Peduli (yang sebelumnya PNPM Peduli) dalam memberdayakan Ibu-ibu korban pelanggaran Hak Asasi Manusia peristiwa 1965 melalui pendekatan inklusi sosial yang dilakukan dengan cara mengupayakan penerimaan masyarakat, akses layanan, dan perubahan kebijakan di 5 wilayah kota/Kab. di DIY.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Edi Suharto kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan yang menyangkut aparatur negara dalam pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk secara langsung mengelola dan mendistribusikan

²² Irena Nuraeni, *Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurusan Pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016).

sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.²³ Kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik biasanya disebut juga sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik menurut Robert Eyeston dalam Budi Winarno ialah sebuah hubungan pemerintah dengan lingkungannya. Dalam pengertian ini Budi Winarno sendiri menegaskan bahwa konsep yang ditawarkan oleh Robert Eyeston ini masih terlalu sangat luas dan kurang pasti batasannya sampai sejauh mana sehingga hal ini diasumsikan bahwa kebijakan publik nantinya akan dapat mencakup banyak hal.²⁴

Agar tidak serampangan dan tidak mencakup banyak hal dalam memaknai kebijakan publik, Thomas R. Dye, seperti yang dikutip Budi Winarno, mengartikan sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan atau tidak dilakukan (*wharever government choose to do or not to do*).²⁵ Dan H. Hugh Heglo dalam bukunya Said Zainal Abidin menyebutkan kebijakan sebagai suatu langkah atau tindakan yang diambil dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu (*a course of action intended to accomplish some end*).²⁶

Dari sini jelas, bahwa dalam pengambilan sebuah kebijakan, sesuatu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah adalah baik

²³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (cet. 3), (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Said Zainal abidin, *Kebijakan Publik (edisi 2)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 6.

atau buruk; bermanfaat atau tidaknya kebijakan tersebut terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang diutarakan Carl Friedrich dalam bukunya Budi Winarno menegaskan bahwa tujuan diambilnya sebuah kebijakan (oleh pemerintah, komunitas, lembaga, dll.) disini harus mempunyai maksud dan tujuan tertentu.²⁷ Artinya sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai dalam sebuah kebijakan sudah mempunyai gambaran atau kerangka capaian yang jelas.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara luas dipandang sebagai tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Yakni melaksanakan undang-undang yang mana seluruh aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan program atau kebijakan.²⁸ Menurut J. Pressman dan A. Wildavsky dalam bukunya Muh. Irfan Islamy dijelaskan sebagai berikut:

Policy implementation is a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieve them. (implementasi kebijakan adalah suatu proses hubungan yang terjadi antara penetapan tujuan dan tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapainya).²⁹

Sementara menurut A. O. Bowman sebagaimana yang dikutip Irfan Islamy implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sebuah proses

²⁷Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori*, hlm. 20-21.

²⁸ Donal van Meter, and Carl E van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (Administration and Society: 1975), hlm. 447. Dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori*, hlm. 147.

²⁹ Muh. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 72.

melaksanakan atau mewujudkan suatu keputusan negara (pemerintah) yang otoritatif.³⁰ Ripley dan Franklin dalam bukunya Budi Winarno berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah segala apa yang terjadi setelah kebijakan (undang-undang) ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis capaian yang nyata (*tangible output*).³¹

Dari keempat definisi implementasi kebijakan tersebut di atas mempunyai persamaan yang cukup kuat, yakni sepakat bahwa implementasi kebijakan itu merupakan sebuah proses untuk mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan program kebijakan secara nyata.

c. Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards dalam bukunya Budi Winarno studi implementasi kebijakan adalah sangat krusial bagi *publik administration* dan *public policy*.³² Winarno sendiri mengatakan bahwa implementasi kebijakan itu merupakan bagian dari salah satu kebijakan publik. Implementasi ini berada pada posisi antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang dipengaruhi kebijakan tersebut.³³ Perhatian atas pentingnya sebuah implementasi kebijakan harus sama halnya dengan tercapainya cita-cita yang diharapkan.

³⁰*Ibid*, hlm. 73.

³¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 149.

³²*Ibid*, hlm. 174.

³³*Ibid*.

Erwards, dalam mengkaji implementasi kebijakan, memulainya dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan: *pertama*, prakondisi-prakondisi atau persiapan apa saja yang dibutuhkan sehingga sebuah implementasi kebijakan berhasil?. *Kedua*, hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan implementasi kebijakan gagal?. setelah itu Erwards mulai menyusun jawaban dari dua pertanyaan itu dengan membicarakan empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi.³⁴

Komunikasi, Secara umum dalam proses komunikasi kebijakan, Erwards membahas 3 hal. Yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).³⁵ Sebelum semua yang bertanggung jawab atas kebijakan mengimplementasikan sebuah keputusan, ia harus menyadari bahwa keputusan dan perintah implementasi keputusan (kebijakan) telah benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab sering kali ditemukan keputusan-keputusan banyak diabaikan karena kesalahpahaman terhadap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan.³⁶

Ada beberapa faktor yang menghambat dalam proses mentransmisikan perintah-perintah implementasi: (1) pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan (pemerintah), (2) informasi melewati berlapis-lapis hierarki

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid*, hlm. 175-181.

³⁶*Ibid*. hlm. 175.

birokrasi, dan (3) adanya persepsi dan atau ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.³⁷

Disamping petunjuk-petunjuk pelaksanaan keputusan (kebijakan) harus sampai pada para pelaksana kebijakan, mengembangkan komunikasi kebijakan secara jelas juga sangat mempengaruhi terealisasinya implementasi sebuah kebijakan.

Hal yang juga sangat mendukung proses komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan adalah konsistensi. Perintah-perintah pelaksanaan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan jelas, jangan sampai perintah-perintah pelaksanaan yang disampaikan bertentangan dengan perintah sebelumnya.³⁸ Jika komunikasi yang dibangun tidak konsisten maka akan membuat para pelaksana kebijakan menjadi bingung atas wewenang dan tugas apa yang harus mereka kerjakan.

Sumber-sumber juga menjadi bagian pendukung yang penting dalam proses terealisasinya implementasi secara efektif. Sumber-sumber yang dimaksud di sini yaitu: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugasnya, wewenang dan fasilitas yang mendukung.³⁹

Staf, yang dimaksud ialah staf yang mempunyai kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis akan

³⁷*Ibid.* hlm. 176.

³⁸*Ibid.*, hlm. 177.

³⁹*Ibid.*, hlm. 181-193.

mendorong implementasi yang efektif jika tidak dibarengi dengan keterampilan-keterampilan yang memadai. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan akan memunculkan dua konsekuensi: beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi dan bahkan tidak akan terpenuhi tepat waktu, dan ketidakefisienan. Di sisi lain, jumlah staf yang sedikit juga bisa menghambat proses terealisasinya implementasi suatu kebijakan.⁴⁰

Jadi, antara kualitas keterampilan dengan jumlah staf harus berbanding lurus atau seimbang untuk mencapai pelaksanaan implementasi kebijakan yang maksimal.

Wewenang, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan akan berbeda-beda bentuk dari suatu program ke program yang lain, serta mempunyai banyak bentuk kewenangan yang berbeda pula pada setiap pelaksana kebijakan. Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan terkadang mempunyai kewenangan yang terbatas dan atau kekurangan kewenangan. Maka dibutuhkanlah sebuah kewenangan formal atau wewenang di atas kertas untuk lebih memberikan kekuatan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan agar bisa terlaksana secara efektif.⁴¹ Sebab hal itu akan sangat membantu agar masyarakat atau lembaga lain mengerti bahwa para pelaksana kebijakan bergerak di atas legalitas yang jelas.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 181-184.

⁴¹*Ibid*, hlm.

Fasilitas, agar pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan efektif, maka dibutuhkan pula fasilitas-fasilitas yang memadai. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf, keahlian-keahlian yang cukup memadai, paham dengan apa yang harus dilakukan, atau bahkan mempunyai wewenang atas tugasnya tanpa ada fasilitas yang mendukung, besar kemungkinan pelaksanaan implementasi kebijakan akan tidak berhasil.⁴² Jadi, fasilitas termasuk bagian penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif.

Kecenderungan-kecenderungan atau pola tingkah laku para pelaksana kebijakan juga akan berdampak pada pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan kecenderungannya serupa dengan para pembuat kebijakan atau perintah-perintah keputusan maka proses implementasi kebijakan akan berlangsung dengan efektif dan kemungkinan keberhasilannya akan cukup besar. Namun, jika kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan berbeda dan merespon perintah kebijakan dengan acuh, artinya tidak ada kesepakatan pemahaman atas kebijakan, maka sudah tentu jelas proses implementasi kebijakan akan terhambat dan bahkan tidak akan berhasil sama sekali.⁴³

Maka penting sekali dalam memilih para pelaksana kebijakan tidak dengan cara serampangan, dibutuhkan seleksi yang ketat dalam memilih sesuai kriteria-kriteria yang dibutuhkan.

⁴²*Ibid*, hlm. 188.

⁴³*Ibid*, hlm. 194.

Menurut Erwards dalam Budi Winarno, dampak dari kecenderungan-kecenderungan terhadap kebijakan-kebijakan ialah banyak kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang terlaksana dengan efektif karena mendapat dukungan dan apresiasi besar dari para pelaksana kebijakan. Namun, pada kondisi yang lain juga banyak kebijakan-kebijakan yang bertentangan langsung dengan pandangan-pandangan para pelaksana kebijakan sehingga berdampak pada ketimpangan antara keputusan-keputusan atau tujuan-tujuan kebijakan dan pencapaian kebijakan.⁴⁴

Struktur birokrasi, Birokrasi secara keseluruhan sering kali menjadi pelaksana keputusan kebijakan. Baik birokrasi yang berada dalam struktur pemerintah maupun organisasi-organisasi swasta lainnya.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan, birokrasi terkadang tidak serta merta berjalan mulus, walaupun sudah ditopang dengan pengetahuan, staf dan bahkan sumber-sumber yang memadai, dalam beberapa kasus mereka terhambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Sebagaimana menurut Erwards yang dikutip oleh Winarno, birokrasi memiliki dua karakteristik utama: *pertama*, birokrasi berkembang sebagai tanggapan internal terhadap tanggapan waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam kerja-kerja organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

⁴⁴*Ibid*,

Kedua, berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi. seperti tekanan dari pejabat-pejabat eksekutif, kelompok-kelompok kepentingan, komite legislatif, konstitusi negara dan kebijakan yang mempengaruhi.⁴⁵ Melihat dari hal tersebut di atas, pengaruh struktur birokrasi terhadap proses implementasi kebijakan tergantung pada kondisi birokrasi organisasi itu sendiri.

2. Tinjauan Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Said Zainal Abidin merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam proses sebuah kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah sebuah wacana yang terdokumentasi yang sama sekali tidak bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikatakan pula bahwa banyak kebijakan yang sangat bagus yang dirancang oleh pemerintah bersama para ahli namun sama sekali tidak ada pengaruh apa-apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hanya karena tidak mampu melaksanakan atau mengimplementasikannya.⁴⁶

Tercapainya sebuah tujuan kebijakan menurut Erwan agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kinerja tim yang berhadapan langsung dengan para penerima manfaat atau kelompok sasaran (Erwan dan Dyah menyebutnya birokrat garda depan), adalah mereka yang secara langsung menentukan siapa kelompok sasarannya dan bagaimana bentuk

⁴⁵*Ibid*, hlm. 202-203.

⁴⁶ Said Zainal abidin, *Kebijakan Publik (edisi 2)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 145.

pelayanannya sesuai dengan frekuensi dan kualitas yang mereka tentukan.⁴⁷ Jadi, tercapai tidaknya sebuah kebijakan yang disusun oleh pemerintah atau suatu lembaga masih akan tergantung terhadap tim pelaksana lapangannya, sejauh mana mereka (birokrat garda depan) konsisten atau tidaknya terhadap misi perjuangan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan publik atau masyarakat.

Namun, cara mengukur birokrat garda depan tersebut, sebagaimana dikatakan Erwan dan Dyah, sangat sulit memakai ukuran atau indikator yang sama dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga sangat variatif.⁴⁸ Jadi tidak sembarangan dalam menentukan indikator keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu, hal itu tergantung dengan kebutuhan yang diinginkan.

Dikatakan pula bahwa dalam studi pelayanan publik, untuk mengukur hasil kinerja kebijakan dapat menggunakan tiga cara pendekatan ini: *Pertama*, pendekatan proses (*proces approach*); *kedua*, pendekatan hasil (*output approach*); *ketiga*, pendekatan gabungan (*process and output approaches*).⁴⁹

Untuk mengukur keberhasilan kebijakan Program Peduli dalam mewujudkan inklusi sosial terhadap ibu-ibu korban peristiwa 1965, penulis akan mencoba menggunakan pendekatan gabungan (*process and output approach*)—sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Erwan, dkk— sebagai tolak ukur

⁴⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), hlm. 189.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 189-190.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 190-191.

keberhasilan kebijakan Program Peduli yang diimplementasi oleh FOPPERHAM terhadap ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Gibson, Jhon, dan Donnelly —sebagaimana yang dikutip oleh Erwin dan Dyah— pendekatan gabungan ada beberapa pendekatan, seperti: keadaptasian, efisiensi, produksi, kepuasan dan pengembangan.⁵⁰

a. Indikator Keadaptasian

Tingkat keadaptasian suatu kebijakan di tengah-tengah kelompok sasaran diasumsikan juga berperan besar dalam mencapai keberhasilan terealisasinya kebijakan yang efektif. Ada kalanya kelompok sasaran menerima dengan senang hati atas realisasi program-program dan terkadang ada juga yang menolak mentah-mentah atas realisasi program dalam proses implementasi suatu kebijakan.

b. Indikator Efisiensi

Selanjutnya keberhasilan sebuah implementasi kebijakan diukur dengan efisiensi waktu pelaksanaannya. Terkadang beberapa pelaksanaan kebijakan selesai sebelum sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan tidak sedikit pula pelaksanaan kebijakan melebihi batas waktu yang ditargetkan.

c. Indikator Produksi

Dikatakan bahwa, hal yang sangat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ialah diukur dengan sejauh mana

⁵⁰*Ibid*, hlm. 191.

program-program yang direalisasikan dapat menghasilkan *output* yang jelas, ada sesuatu hal baru yang dihasilkan setelah program-program selesai direalisasikan, baik itu berupa barang atau lainnya.

d. Indikator Kepuasan

Indikator ini mengukur sejauh mana sebuah kebijakan mampu memberi kepuasan terhadap kelompok sasaran program. kelompok sasaran program kebijakan dapat menikmati manfaat program-program yang telah direalisasikan oleh para pelaksana program kebijakan.

e. Indikator Pengembangan

Indikator ini menilai sejauh mana program-program yang dikembangkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan mampu membangun kondisi masyarakat (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), terutama kondisi mental masyarakat.

Setelah selesainya program-program yang dikembangkan dan direalisasikan banyak masyarakat yang tingkat kemandiriannya semakin kuat dan lebih produktif, dan tidak bisa dipungkiri dalam suatu hal banyak masyarakat yang malah tetap dalam kondisi semula dan bahkan mengalami kemunduran; semakin tidak berkembang. Hal ini bisa jadi lantaran program-program yang dikembangkan sifatnya *charity* atau cara pendekatannya yang salah.

3. Tinjauan Inklusi Sosial

Istilah inklusi merupakan sebuah istilah yang sudah cukup familiar. Istilah ini biasanya sering kita temukan dalam kajian-kajian tentang

pendidikan dan disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata inklusif mempunyai arti termasuk; terhitung.⁵¹ Pengertian inklusi ini digunakan sebagai pendekatan untuk mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka.

Menurut DAKSA Foundation (Yayasan Daya Akselerasi Aditama)⁵² bahwa inklusi adalah sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang tidak kaku dan semakin terbuka; mengajak serta mengikutsertakan semua masyarakat dengan berbagai perbedaan karakteristik, kemampuan, latar belakang, kondisi, status sosial, etnik, budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya.⁵³ Sedangkan inklusi sosial menurut SATUNAMA⁵⁴ adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.⁵⁵

Alisa Wahid, seorang tokoh aktivis sosial dan keagamaan, juga memberikan pemaknaan terhadap istilah inklusi sosial. Menurutnya, inklusi sosial merupakan sebuah gerakan melibatkan semua masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa sesuai dengan cita-cita bangsa dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dengan cara menjamin kemanusiaan,

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵² Sebuah organisasi sosial non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada upaya untuk mendorong kesetaraan dalam berbagai keragaman kondisi fisik. pemberdayaan para penyandang disabilitas/difabel.

⁵³ DAKSA Foundation, *Pengertian Inklusi*, <http://daksa.or.id/pengertian-inklusi/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 04:28 WIB.

⁵⁴ SATUNAMA adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan

⁵⁵ SATUNAMA, *Menuju Indonesia yang Inklusif*, <http://satunama.org/2755/menuju-indonesia-yang-inklusif/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 05:41 WIB.

membangun sikap setara dan semartabat bagi setiap warga negara Indonesia.⁵⁶

Dikatakan pula oleh Alisa, bahwa untuk menciptakan lingkungan yang inklusif kita harus punya cara pandang untuk merangkul semua pihak dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang minoritas dan saat ini masih terpinggirkan agar turut serta berpartisipasi bahkan ikut memiliki serta ikut menentukan segala hal yang terjadi di Indonesia. Dalam kebijakan publik misalnya, menurutnya, kita harus memastikan bahwa semua masyarakat bisa ikut serta menyusun rencana-rencana pembangunan, membangun desain tata ruang, dan dalam memenuhi kebutuhan semua warga masyarakat.⁵⁷ Hal ini karena, sebagai warga masyarakat, kita semua mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama satu dengan lainnya dalam proses pembangunan di negeri ini.

Untuk memastikan kehidupan masyarakat inklusif, maka kewajiban dasar yang harus dipenuhi semua masyarakat menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Bab IV Pasal 69 berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (ayat 1)”

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukannya.(ayat 2)”⁵⁸

⁵⁶ Inklusi Sosial Menurut Alisa Wahid, https://www.youtube.com/watch?v=_O23ClfMKU4 diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 04:54 WIB.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Disamping itu, hal-hal yang juga harus diperhatikan adalah hak-hak satu sama lain sebagai warga Negara. Hak-hak tersebut menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 diantaranya adalah: hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. hak wanita, dan hak anak.⁵⁹

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang *Implementasi Program Peduli dalam Mewujudkan Inklusi Sosial terhadap Perempuan Korban Peristiwa 1965 oleh FOPPERHAM Yogyakarta* ini agar memperoleh hasil yang sempurna, maka dibutuhkanlah sebuah metode. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa-peristiwa tanpa suatu maksud mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶⁰ Penelitian ini hanya mendeskripsikan proses implementasi Program Peduli yang dilaksanakan oleh FOPPERHAM di DIY, dengan kelompok sasaran ibu-ibu korban peristiwa 1965, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif, serta sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam proses tersebut.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 3.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) yang beralamatkan di Keparakan Kidul RT 50/RW 11 Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta. FOPPERHAM merupakan salah satu lembaga lokal se-Indonesia yang menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan Program Peduli di lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). FOPPERHAM ini bekerja di bawah lembaga payung nasional Program Peduli Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) yang bergerak dalam isu penanganan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam Program Peduli ini FOPPERHAM fokus menangani kelompok sasaran ibu-ibu korban peristiwa 1965 di DIY.

Ketertarikan penulis terhadap Program Peduli ini yaitu, *pertama*, Program Peduli merupakan program pemerintah yang dirasa cukup mampu untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan sosial yang ada di Indonesia. Terutama persoalan-persoalan terkait dengan kehidupan ibu-ibu korban peristiwa 1965 yang selama ini masih mengalami diskriminasi akibat stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya.

Kedua, dalam implementasi program ini, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenko PMK, bermitra dengan FOPPERHAM sebagai kelompok masyarakat sipil lokal untuk melaksanakan Program Peduli dalam memberdayakan ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan *ketiga*, isu peristiwa 1965 merupakan isu yang sangat sensitif di tengah-tengah kehidupan

bermasyarakat dan bernegara di Indonesia; pro dan kontra terkait isu ini masih sangat kuat dan terasa.

3. Subjek dan obyek penelitian

a. Subjek penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk pengumpulan data-data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian. Untuk mendapatkan informasi tersebut dibutuhkan adanya informan atau sumber informasi. Adapun sumber data yang penulis maksud ada dua: yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah Mohammad Noor Romadlon sebagai Direktur FOPPERHAM sekaligus sebagai pengelola Program Peduli, Pipit Ambarmirah sebagai staff yang paling awal (kesepakatan kontrak) terlibat proses pelaksanaan Program Peduli, Hendrik Sukendar sebagai staff *Devisi Community Organizer (CO)* yang terlibat banyak dalam pelaksanaan Program Peduli di lapangan, serta 4 orang ibu-ibu korban peristiwa 1965 sebagai penerima manfaat langsung pelaksanaan Program Peduli perwakilan dari 4 kabupaten di DIY: Bu HT asal Kab. Sleman, Bu KMY asal Kab. Bantul, Bu KN asal Kab. Gunungkidul dan Bu EB asal Kab. Kulon Progo.

Sementara sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Hal ini bisa melalui buku-buku perpustakaan, dokumentasi dan keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Obyek penelitian

Penentuan obyek penelitian didasari oleh permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan masalah yang ada, yaitu Program Peduli dalam rangka mewujudkan inklusi sosial terhadap ibu-ibu korban peristiwa 1965 yang dilaksanakan oleh FOPPERHAM di DIY yang meliputi implementasi program serta keberhasilan yang dicapai dalam proses implementasi program tersebut.

4. Teknik penentuan informan

Dalam memilih dan menentukan informan, peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dipilih menjadi sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita teliti, atau orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁶¹ Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan pada bagian subyek penelitian di atas adalah sebagai berikut: Romadlon, Pipit Ambarmirah, Hendrik basguni, Bu HT, Bu KMY, Bu KN dan Bu EB.

Adapun kriteria yang penulis susun sesuai dengan status masing-masing informan adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus : orang yang paling awal terlibat langsung dalam proses Program Peduli sekaligus sebagai perencana dan penyusun program-program kegiatan.

⁶¹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 301.

- b. Staf atau relawan: sering terlibat dalam rapat kordinasi dan evaluasi program bersama pengurus serta sering terlibat langsung dalam pelaksanaan program kegiatan di seluruh wilayah di DIY
- c. Ibu-ibu korban peristiwa 1965: Koordinator ibu-ibu dan sering terlibat langsung dalam pelaksanaan program kegiatan di masing-masing wilayah.

Tahapan yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah mewawancarai para informan terkait dengan proses dan model implementasi serta keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam implementasi Program Peduli yang dilakukan FOPPERHAM di DIY.

5. Data dan sumber data

Data dan sumber data yang digali dalam penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Data dan Sumber Data

No	Masalah yang Diajukan	Data yang Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data
1	Model implementasi Program Peduli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pola komunikasi 2. Sumber-sumber pendukung 3. Kecenderungan individu pelaksana 4. Struktur birokrasi 	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Mohammad Noor Romadlon, Pipit Ambarmirah dan Hendrik Basguni Sukendar
2	Hasil implementasi Program Peduli	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keadaptasian program kegiatan 2. Efisiensi pelaksanaan program kegiatan 3. Kepuasan kelompok sasaran 	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hendrik Basguni sukendar, Pipit Ambarmirah dan 4 Orang ibu korban

		4. Produk yang dihasilkan 5. Pengembangan diri		perwakilan dari 4 kabupaten di DIY
--	--	---	--	------------------------------------

6. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara yang dilakukan seorang peneliti dalam proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dua jenis observasi, yaitu observasi sebelum wawancara dan observasi setelah wawancara. Observasi sebelum wawancara penulis lakukan dalam rangka sekedar untuk melihat dan mengamati secara langsung. Setelah itu melakukan wawancara secara mendalam kepada para subyek penelitian atau informan serta terus melakukan pengamatan lokasi yang berkaitan langsung dengan data hasil perolehan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi secara verbal seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶² Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada nama-nama yang telah disebutkan di bagian Subyek Penelitian: Mohammad Noor Romadlon, Pipit Ambarmirah, Hendrik Basguni Sukendar, Bu Hartiti, Bu Kadmiyati, Bu Endang dan Bu Kusnun.

⁶² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Angkas, 1996), hlm. 113.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang penulis lakukan ialah dengan penggalan data-data melalui cara mengumpulkan hasil foto, rekaman, dan arsip sebagai hasil dokumentasi atas kegiatan atau program kerja yang telah selesai dikerjakan FOPPERHAM sebelum-sebelumnya.

7. Teknik validitasi data

Teknik validitas data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian, yaitu digunakan dalam rangka membuktikan atas keaslian data dan membangun cara memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan. Dalam penelitian ini, untuk membuktikan keaslian data yang didapat, penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Denzin ada empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁶³

Untuk itu, dalam memeriksa kevaliditasan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori. Yang dilakukan dengan langkah-langkah membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil wawancara, membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan membandingkan data hasil pengamatan dengan dokumen.

8. Metode Analisis data

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rokdakarya, 2014), hlm. 327-328.

Dalam penelitian, setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dari lapangan, langkah selanjutnya adalah proses analisa. Analisa merupakan tahap yang sangat penting dan sangat menentukan hasil dari suatu penelitian. Aktivitas dalam analisa data ada beberapa tahap. yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶⁴

Reduksi Data, yaitu tahap merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi ini penulis lakukan ketika melakukan pentranskripsi hasil wawancara yang kemudian dipilah sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Transkrip yang dirasa tidak perlu maka penulis abaikan, sebaliknya transkrip yang dirasa penting maka penulis masukkan sebagai hasil data.

Penyajian data, yaitu data yang didapat kemudian dilakukan proses penyusunan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data akan terorganisir, tersusun sehingga lebih mudah dipahami.⁶⁵ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan data berupa teks naratif, tabel dan foto yang akan dilakukan ketika penyusunan bab 2 dan bab 3.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 336-343.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 341.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. Proses ini penulis susun di bab 4.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam 4 bab, dan masing-masing bab terdapat beberapa sub-sub bagian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pembahasan. pada bab ini ada dua. *pertama*, gambaran umum Program Peduli yang meliputi sejarah, program kerja dan kelompok sasaran, dan mitra pelaksana Program Peduli. *Kedua*, gambaran umum FOPPERHAM meliputi letak geografis wilayah, sejarah, lambang/logo, visi-misi, tujuan strategis, dan struktur pengurus FOPPERHAM.

Bab III; Menguraikan hasil penelitian. Yaitu model dan keberhasilan yang dicapai dalam implementasi Program Peduli untuk membangun inklusi sosial terhadap ibu-ibu korban peristiwa 1965 yang dilaksanakan oleh FOPPERHAM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV: Penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari peneliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya pembenaran teori yang sudah ada. Penulis mengacu pada teori Edward dan Gibson. Edward mengatakan bahwa pada proses implementasi kebijakan ada empat poin yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Sementara Gibson mengkonsepsikan bahwa untuk melihat keberhasilan dalam implementasi kebijakan bisa melalui pendekatan gabungan proses dan hasil (*process and output approach*) yaitu harus memperhatikan indikator keadaptasian, efisiensi, produksi, kepuasan dan pengembangan.

Implementasi kebijakan Program Peduli yang dilakukan FOPPERHAM terhadap ibu-ibu korban peristiwa 1965, sebagaimana yang telah dideskripsikan secara spesifik pada bab per bab sebelumnya, jika dikaitkan dengan teori Edward dan Gibson diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model implementasi kebijakan Program Peduli oleh FOPPERHAM dalam mewujudkan inklusi sosial ibu-ibu korban peristiwa 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah sebagai berikut:
 - a. FOPPERHAM menggunakan pola komunikasi birokrasi yang bersifat *top down*, Staff dan relawan bekerja atas dasar perintah dan intruksi dari struktur birokrasi yang lebih tinggi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara kelompok dan individu. Media yang digunakan ialah forum rapat koordinasi dan *whatsapp group* (WAG).

- b. FOPPERHAM melakukan perekrutan relawan secara berkala untuk membantu pelaksanaan program kegiatan di lapangan. Kemudian memberikan fasilitas kepada staff dan relawan dalam bentuk pendidikan, pelatihan-pelatihan dan alat-alat yang memadai demi maksimalnya kerja-kerja di lapangan.
 - c. Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA, sebagai Mitra Payung Program Peduli) merupakan sebuah lembaga yang menjadi Sumber informasi utama dan pemberi kewenangan kepada FOPPERHAM dalam implementasi Program Peduli.
2. Keberhasilan FOPPERHAM dalam implementasi kebijakan Program Peduli:
- a. Rencana program kegiatan FOPPERHAM diterima secara terbuka oleh ibu-ibu korban 1965. Sebelum rencana program dilaksanakan, FOPPERHAM terlebih dahulu melakukan sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dan dampak positif dari pelaksanaan program kegiatan kepada ibu-ibu korban peristiwa 1965.
 - b. Sebagian besar ibu-ibu korban peristiwa 1965 merasa puas dan terbantu dengan adanya Program Peduli, meskipun sebagian yang lain juga belum merasakan dampak apa-apa. Mereka merasa *di-uwongke*, pelatihan-pelatihan menambah wawasan, dan pemeriksaan kesehatan membuat penyakit yang diderita ibu-ibu mulai berangsur pulih.
 - c. Beberapa ibu-ibu korban peristiwa 1965 sudah mendapat akses layanan dan bantuan dari pihak pemerintah maupun swasta. Seperti bantuan kursi roda

dari GKR. Hemas dan dari Dinas Sosial Yogyakarta, serta bantuan layanan kesehatan gratis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian di FOPPERHAM Yogyakarta terkait dengan proses implementasi Program Peduli dalam rangka mewujudkan inklusi sosial ibu-ibu korban peristiwa 1965, penulis akan memberikan beberapa saran secara obyektif sesuai dengan topik pembahasan. Tidak ada maksud apa-apa, saran-saran yang penulis tawarkan ini hanya dalam rangka ingin memberikan kontribusi positif demi kemajuan Lembaga FOPPERHAM ke depan. Dan semoga FOPPERHAM dapat menjadi contoh bagi lembaga lain dalam melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok miskin marginal khususnya kelompok karena diskriminasi masyarakat dan pemerintah serta kelompok yang harus menanggung stigma negatif atas kejahatan pemerintah pada masa lalu.

Adapun saran-saran yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut:

1. FOPPERHAM perlu untuk segera menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP). Hal ini dimaksudkan agar manajemen pembagian kerja di setiap level birokrasinya jelas dan tidak tumpang tindih. Pimpinan, staff dan relawan FOPPERHAM nantinya dapat mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga gerak kerja setiap individu bisa tersistematis.
2. FOPPERHAM penting untuk membuat sistem keamanan lembaga untuk menjamin rasa aman, keselamatan dan kenyamanan staff dan relawan ketika bekerja di lapangan. Hal ini mengingat isu yang diusung FOPPERHAM selama

ini, isu peristiwa 1965, merupakan isu yang masih sangat sensitif dan kontroversial di tengah-tengah kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

3. Pemerintah sebaiknya lebih merespon baik usaha dan upaya FOPPERHAM dalam melakukan dampingan dan pemberdayaan kepada kelompok korban peristiwa 1965 di DIY. Hal ini dimaksudkan supaya stigma negatif yang melekat pada diri korban peristiwa 1965 yang masih kuat ditengah-tengah masyarakat bisa mulai diminimalisir.
4. Pemerintah diusahakan mendorong masyarakat luas agar mempunyai cara pandang baru tentang sejarah 1965, supaya kepekaan sosial terhadap para korban 1965 dapat tumbuh. Sehingga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, para korban 1965 bisa diperlakukan sama layaknya dengan kelompok masyarakat pada umumnya: tidak ada lagi diskriminasi sosial pada para korban peristiwa 1965.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik (edisi 2)*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Adiwimarta, Sri Sukei, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. 2), Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Akatiga, *Marginalized Groups in PNPM-Rural*, 2010
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Ikhsan, *Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan dalam Pengembangan Sumber daya Manusia (Studi di desa Potonoro Kecamatan Banguntapan Kabupaten bantul Yogyakarta)*, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, 2010.
- Ishak Salim, dkk., *Indonesia dalam Desa Inklusi: Pembelajaran dari Temu Inklusi 2014*, Yogyakarta: SIGAP, 2015.
- Islamy, Muh. Irfan, *Kebijakan Publik*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Jaya, Pajar Hatma Indra, *Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan Kasus PNPM Mandiri sebagai Model Nasional Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta: mu3, 2010.
- Khasanah, Uswatun, *Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Pedesaan (PNPM M-D) dalam Memberdayaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Girirejo Bantu*, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rokdakarya, 2014
- Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (cet. 2) Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Meter, Donal van, dan Carl E van Horn, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework"* Administration and Society: 1975.
- Munjazi, Syukron, *Pemberdayaan masyarakat untuk Mengurangi Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan)*, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Angkas, 1996.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (cet. X), Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.

Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012.

Rais, Heppy El, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Suciati, Mami, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Sekolah Perempuan, Studi terhadap PNPB Peduli Lakpesdam NU Bantul*, Yogyakarta: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014

Sugiana, Puji Meilita, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan*, Jakarta: Program Studi administrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (cet. 3), Bandung: Alfabeta, 2011.

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Usman, Sunyoto, *Esai-esai Sosiologi: Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.

B. INTERNET

<http://daksa.or.id/pengertian-inklusi/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 04:28 WIB.

<http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/jcls1363200676.pdf> diakses pada 7 Maret 2016, Jam 11:18 WIB.

<http://programpeduli.org/tentang/> diakses pada tanggal 24 Maret 2016 pada jam 12:25 WIB.

<http://satunama.org/2755/menju-indonesia-yang-inklusif/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 05:41 WIB.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag&hl=en> diakses pada 15 Juli 2017 jam 09:51 WIB.

https://www.youtube.com/watch?v=_O23ClfMKU4 diakses pada 8 Agustus 2017
pukul 04:54 WIB.





LAMPIRAN – LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PANDUAN WAWANCARA

Panduan wawancara untuk pengurus atau pengelola dan staff/relawan

FOPPERHAM:

1. Apa itu FOPPERHAM?
2. Dalam rangka apa FOPPERHAM itu ada?
3. Apa visi dan misi FOPPERHAM?
4. Kapan FOPPERHAM didirikan?
5. Apa itu Program Peduli?
6. Alasan apa FOPPERHAM terpilih menjadi bagian dalam pelaksanaan Program Peduli?
7. Mulai sejak kapan FOPPERHAM terlibat dalam pelaksanaan Program Peduli?
8. Sebagai apa posisi FOPPERHAM di Program Peduli?
9. Siapa saja yang menjadi penerima manfaat dalam pelaksanaan Program Peduli?
10. Model seperti apa yang digunakan FOPPERHAM dalam mengimplementasikan Program Peduli?
11. Bagaimana strategi yang dikembangkan FOPPERHAM agar proses implementasi Program Peduli bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan?
12. Sejauh mana keberhasilan dan capaian FOPPERHAM dalam mengimplementasikan Program Peduli?

Panduan wawancara untuk ibu-ibu korban 1965 sebagai kelompok sasaran implementasi Program Peduli oleh FOPPERHAM:

1. Apa yang Ibu ketahui tentang Program Peduli?
2. Mulai sejak kapan Ibu mengetahui Program Peduli?
3. Apa saja program-program kegiatan yang Ibu ketahui dalam implementasi Program Peduli oleh FOPPERHAM?
4. Apa yang ibu dapatkan dari implementasi Program Peduli yang dilakukan oleh FOPPERHAM?
5. Apa kesan dan pesan Ibu selama menjadi bagian dalam implementasi Program Peduli?



Imam Hanafi

Lahir di Sumenep, 8 Desember 1993
Alamat asal: Barat Leke RT 003/RW 001 Errabu, Kec. Bluto,
Kab. Sumenep

Education

MI Mashlahatul Hidayah Sumenep (1999 – 2005)	MTs. Mashlahatul Hidayah Sumenep (2005 – 2008)	MA Mashlahatul Hidayah Sumenep (2008 – 2011)	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 – 2017)
--	--	--	---

Experience

- *Sekretaris Organisasi Santri Mashlahatul Hidayah Sumenep
---*
- *Sekretaris Lembaga Seni & Budaya Sanggar Musafir Mashlahatul Hidayah
---*
- *Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komiseriat Fakultas Dahwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
---*
- *Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KeMPed) Yogyakarta
---*
- *Intellectual Transformation (INTRANS) Yogyakarta
---*
- *Koordinator Riset Jejak Institut Yogyakarta
---*
- *Keluarga Mahasiswa Sumenep Yogyakarta (KMSY)
---*
- *Anggota Koordinator Keagamaan Farum Silaturrahmi Mahasiswa
Keluarga Madura Yogyakarta (FSM-KMY)
---*
- *Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham) Yogyakarta
---*
- *Kiprah Perempuan (Kipper) Yogyakarta
---*
- *Komite Pejuang Perempuan (KPP) Yogyakarta
---*